

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI ERA GLOBALISASI

Lutfia Lukinita<sup>1</sup>, Annisa' Faza Syawalia<sup>2</sup>, Indah Prabawati<sup>3</sup>, Firre An Suprpto<sup>4</sup>

Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [lutfialukinita@gmail.com](mailto:lutfialukinita@gmail.com)<sup>1</sup>, [fazaannisa3@gmail.com](mailto:fazaannisa3@gmail.com)<sup>2</sup>, [indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)<sup>3</sup>,  
[firresuprpto@unesa.ac.id](mailto:firresuprpto@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak** – Kemiskinan tetap menjadi masalah struktur yang rumit di Indonesia, terutama dengan fenomena globalisasi saat ini yang memperlebar kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti proses implementasi kebijakan publik dalam program pengentasan kemiskinan dalam bentuk beberapa bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Langsung (BLT), dan Kartu Pintar Indonesia (KIP). Melalui tinjauan pustaka deskriptif dengan penerapan pendekatan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah dalam implementasi program pengentasan kemiskinan, antara lain ketidakakuratan data penerima manfaat, koordinasi antar lembaga yang buruk, dan inefisiensi distribusi. Menurut temuan, program bantuan sosial telah terbukti cukup berhasil dalam menjaga daya beli, meskipun ada kebutuhan untuk transformasi dalam hal tata kelola dan peningkatan sistem data melalui pembentukan DTSEN dan SIKS-NG. Selain itu, sangat penting untuk menggeser strategi kebijakan ke program pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan daripada program bantuan sosial, yang membutuhkan pemimpin daerah yang visioner.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Kemiskinan, Globalisasi, Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan.

### ABSTRACT

*Poverty remains an intricate structure problem in Indonesia, especially with the current phenomena of globalization which widen the gap between socio-economic groups. The purpose of this paper is to examine the implementation process of public policy in poverty reduction programs in the forms of several social assistance, namely the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), Direct Cash Assistance (BLT), and the Indonesia Smart Card (KIP). Through a descriptive literature review with the application of Van Meter and Van Horn policy implementation approach, this research identifies several problems within the implementation of poverty reduction programs, among others the inaccuracy of data on beneficiary, poor inter-agency coordination, and distribution inefficiency. According to the findings, social assistance programs have proved to be quite successful in preserving purchasing power, although there is a necessity for transformation in terms of governance and upgrading the data system through the establishment of the DTSEN and SIKS-NG. In addition, it is crucial to shift the policy strategy into a more sustainable economic empowerment program rather than social assistance program, which requires visionary regional leaders.*

**Keywords:** Public Policy, Poverty, Globalization, Social Assistance, Policy Implementation.

### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang memadai, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Kondisi tersebut masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Selain berdampak pada aspek ekonomi, kemiskinan juga mempengaruhi stabilitas sosial serta menghambat pembangunan berkelanjutan (Mansur 2024). Oleh karena itu kemiskinan menjadi persoalan yang sulit diatasi meskipun berbagai program pemerintah telah dilaksanakan, karena masih terdapat faktor struktural, lemahnya implementasi kebijakan dan tantangan sistematis yang saling berkaitan.

Globalisasi merujuk pada proses integrasi dan interdependensi antarnegara di seluruh

dunia melalui pertukaran barang, jasa, informasi, budaya, dan modal yang berlangsung semakin cepat tanpa batas. Perkembangan globalisasi telah membawa berbagai perubahan, seperti meningkatnya arus perdagangan bebas, mobilitas tenaga kerja, dominasi perusahaan multinasional di Indonesia (Emilia et al. 2024). Namun demikian, arus globalisasi justru cenderung memperlebar kesenjangan sosial, khususnya di negara berkembang. Meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, manfaat globalisasi tidak dirasakan secara merata, sehingga kelompok kaya semakin kaya dan kelompok miskin tertinggal. Kondisi tersebut menuntut peran aktif pemerintah dalam melindungi serta memberdayakan kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga memberikan akses terhadap sumber daya produktif, seperti kredit usaha murah bagi pelaku usaha mikro dari keluarga miskin agar mereka mampu bersaing di pasar global, bukan sekedar penerima bantuan sosial pasif. Situasi ini menunjukkan pentingnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin yang bersifat inklusif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kondisi kesenjangan sosial di era globalisasi tersebut mendorong pemerintahan untuk menghadirkan berbagai kebijakan publik melalui program seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, serta Kartu Indonesia Pintar. Program-program tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala sehingga implementasinya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Permasalahan utama dalam implementasi program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, serta Kartu Indonesia Pintar terletak pada ketidak teraturan data penerima, lemahnya koordinasi antar instansi, serta berbagai kendala teknis di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Implementasi kebijakan perlu dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, mengukur tingkat efektivitas, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal bagi masyarakat. Analisis tersebut dapat mendorong terciptanya siklus perbaikan berkelanjutan, mengungkap potensi kegagalan struktural seperti exclusion error, serta mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan dalam menghadapi tuntutan globalisasi. Apabila implementasi kebijakan, termasuk program bantuan sosial seperti PKH tidak berjalan secara tepat sasaran, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian fiskal serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan publik di Indonesia berjalan sesuai dengan regulasi pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu analisis faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program bansos seperti PKH, BPNT, BLT, dan KIP. Serta penelitian ini juga berupaya melihat sejauh mana efektivitas program-program tersebut dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia di tengah tantangan era globalisasi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang dapat dipercaya. Melalui metode ini, peneliti berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana kebijakan publik berperan dalam mengatasi

kemiskinan di era globalisasi berdasarkan kajian yang sudah ada sebelumnya.

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber secara jelas dan sistematis. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat berbagai pandangan, konsep, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan publik dan kemiskinan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan fokus pada analisis dari sumber-sumber yang sudah tersedia.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti memilih jurnal ilmiah, buku, serta sumber akademik lainnya yang membahas mengenai kebijakan publik, kemiskinan, dan pengaruh globalisasi. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif agar informasi yang digunakan benar-benar sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Kedua, peneliti membaca dan memahami isi dari sumber-sumber tersebut. Ketiga, peneliti mencatat dan mengelompokkan informasi penting yang relevan dengan penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sedang dikaji.

Setelah data dari berbagai literatur terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan berbagai pendapat, teori, serta hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian, informasi tersebut disusun secara sistematis agar dapat menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan di era globalisasi.

Melalui metode studi literatur deskriptif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kebijakan publik serta berbagai faktor yang mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Globalisasi merupakan proses mendunia yang membawa perubahan cepat pada akses informasi, teknologi dan budaya ke berbagai negara. Fenomena ini menciptakan dinamika masyarakat yang terbuka (Studi, Negara, dan Putra 2022). Namun, disisi lain globalisasi juga dapat memperbesar kesenjangan ekonomi, baik antarnegara, antarwilayah, maupun antar kelompok masyarakat. Terutama antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan, teknologi, dan modal cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang globalisasi, sedangkan kelompok masyarakat miskin justru semakin tertinggal (Emilia et al. 2024).

Kesenjangan ini memaksa pemerintah untuk mengambil peran aktif melalui intervensi kebijakan publik. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral, melainkan menuntut sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Suardini et al. 2025). Pemerintah sendiri telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, khususnya melalui program bantuan sosial. Program seperti program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program-program ini menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial di tengah tekanan globalisasi.

Implementasi kebijakan bantuan sosial di Indonesia yang mencakup PKH, BPNT, BLT, dan KIP secara fundamental masih terbentur pada persoalan integrasi data kemiskinan yang dinamis. Ketidakteraturan data ini bukan hanya berdasarkan dari masalah teknis, melainkan cerminan dari lemahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutaran terakhir data secara berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan dalam studi kasus di enam daerah di Indonesia (Widyaningsih 2023), banyak pemerintah kabupaten/kota yang hanya melakukan pemutakhiran data sebagai formalitas untuk menggugurkan kewajiban dari pemerintah pusat, tanpa berorientasi pada kualitas proses. Akibatnya, terjadi variasi kualitas dari antarlokasi yang memicu tingginya angka exclusion error (masyarakat mampu menerima bantuan). Kondisi ini diperparah oleh status sosial ekonomi penduduk yang sangat dinamis, sementara frekuensi verifikasi dan validasi di lapangan seringkali tidak sebanding dengan kecepatan perubahan data kemiskinan tersebut, sehingga penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Untuk memutus pada permasalahan data tersebut, pemerintah melakukan reformasi sistemik melalui transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025. Langkah ini merupakan strategi yang penting untuk menciptakan integrasi data yang komprehensif dengan menggabungkan tiga sumber utama, yaitu Regsosek, DTKS, dan P3KE (Zein 2026). Sejak awal kemunculannya melalui Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada 2005 hingga pembentukan Basis Data Terpadu (BDT), pemerintah terus berupaya menyempurnakan metode pendataan untuk memastikan bantuan menjangkau kelompok termiskin secara efektif. Dengan hadirnya DTSEN, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral antar lembaga karena sistem ini diposisikan sebagai acuan tunggal yang mengintegrasikan informasi kependudukan dengan peringkat kesejahteraan keluarga secara riil (Zein 2026).

Untuk menjamin akurasi data, implementasi kebijakan terbaru menekankan pada syarat integritas data yang sangat ketat melalui mekanisme sinkronisasi DTSEN. Setiap usulan data baru wajib memenuhi kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan data Dukcapil serta bersifat tunggal. Menurut (Zein 2026), mekanisme verifikasi dan validasi (verval) dilakukan secara sistematis dan berjenjang melalui aplikasi SIKS-NG, dimulai dari tingkat pemerintah daerah (Bupati/Wali Kota) hingga penetapan akhir oleh Menteri Sosial di tingkat pusat. Proses ini menjadi sangat krusial terutama bagi program bantuan bersyarat seperti PKH, di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib memenuhi komitmen di bidang kesehatan dan pendidikan (Zein 2026). Ketegasan dalam proses verval ini merupakan instrumen utama pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, efektifitas program bantuan sosial tidak hanya diukur dari lancarnya penyaluran, tetapi juga pada keberhasilan strategi graduasi atau pengakhiran kepersetaan. Dalam ekosistem DTSEN, pemerintah menggunakan metode pemeringkatan kesejahteraan yang objektif untuk mengidentifikasi KPM yang telah mengalami peningkatan status ekonomi (Zein 2026). Graduasi dapat terjadi secara ilmiah maupun hasil pemutakhiran data sosial ekonomi, di mana keluarga yang sudah mampu secara finansial akan dilepas dari program tersebut untuk memberikan ruang bagi warga lain yang lebih membutuhkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan koordianasi antar instansi dalam pengelolaan DTSEN, siklus perbaikan berkelanjutan ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sekaligus menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.

Evaluasi terhadap efektivitas program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT

menunjukkan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Berdasarkan temuan (Abbas 2023), bantuan tersebut secara umum efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, terutama dalam menjaga level konsumsi rumah tangga miskin. Namun, terdapat tantangan besar dalam aspek keberlanjutan, di mana program ini dinilai kurang optimal dalam mendorong peningkatan pendapatan mandiri penerima manfaat. Hal ini mengidentifikasi bahwa meskipun bantuan sosial mampu meringankan beban pengeluaran, fungsinya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan jangka panjang masih memerlukan penguatan pada program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak terjebak dalam ketergantungan bantuan (Abbas 2023).

Ditinjau dari dimensi efisiensi, alokasi anggaran perlindungan sosial yang mencapai angka triliunan rupiah memunculkan fenomena paradoks dalam kebijakan fiskal Indonesia. (Abbas 2023) mencatat bahwa meskipun total anggaran perlindungan sosial nasional dari tahun 2013 hingga 2022 telah mencapai Rp 3.399,87 triliun, peningkatan anggaran tersebut sering kali diiringi oleh kenaikan jumlah penerima dan angka kemiskinan di beberapa wilayah. Di Provinsi Sulawesi Barat misalnya, peningkatan anggaran justru terjadi bersamaan dengan fluktuasi angka kemiskinan yang tetap tinggi, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam manajemen distribusi bantuan. Kondisi ini mempertegas bahwa besarnya kucuran dana APBN tidak selalu berkorelasi lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan jika tidak dibarengi dengan ketetapan sasaran dan strategi intervensi yang responsif terhadap tingkat keparahan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Abbas 2023).

Persoalan pemerataan (equity) tetap menjadi hambatan struktural yang memicu kerugian fiskal dan ketidakadilan sosial. Hasil evaluasi menggunakan pendekatan mixed-methods mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi bantuan yang signifikan, di mana fenomena exclusion error dan inclusion error masih ditemukan secara nyata di lapangan (Abbas 2023). Banyak keluarga miskin ditemukan yang seharusnya berhak justru tidak terjangkau oleh program, sementara terdapat penerima manfaat yang secara kriteria ekonomi sebenarnya tidak lagi memenuhi syarat kemiskinan. Menurut (Abbas 2023), lemahnya akurasi dalam dimensi pemerataan ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan distribusi, tetapi juga menghambat pencapaian target target RPJMN dalam pengurangan angka kemiskinan satu digit secara nasional.

Transformasi digital dalam distribusi bantuan sosial kini menjadi pilar utama dalam modernisasi tata kelola kesejahteraan sosial di Indonesia. Instrumen krusial dalam langkah ini adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang berfungsi sebagai tulang punggung integrasi data kependudukan secara real-time (Amelia 2024). Penggunaan sistem ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan validasi silang antara data bantuan dengan data identitas kependudukan, yang secara empiris terbukti mampu menekan margin error data hingga 32% di beberapa wilayah seperti Gresik dan Surakarta. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga meminimalisir potensi duplikasi data dan penerima fiktif yang selama ini menjadi celah kebocoran anggaran dan.

Selain sistem sentralistik, inovasi digital yang bersifat partisipatif dan adaptif juga menjadi kunci keberhasilan di tingkat daerah. Aplikasi seperti Sapawarga di Jawa Barat dan dashboard transparansi di Banyuwangi telah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan distribusi bantuan, yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas pemerintah (Amelia 2024). Lebih jauh, bagi wilayah dengan keterbatasan infrastruktur internet, penggunaan teknologi adaptif seperti WhatsApp Bot di Sleman atau SMS Gateway di daerah terpencil membuktikan bahwa digitalisasi tidak harus selalu

kompleks, teknologi tepat guna yang kontekstual dapat meningkatkan partisipasi publik tanpa bergantung pada jaringan internet yang stabil. Strategi ini menciptakan ekosistem transparansi di mana warga dapat mengakses informasi secara akurat, melaporkan ketidaksesuaian data, dan memantau status validasi secara mandiri.

Keberhasilan transformasi digital ini pada akhirnya sangat bergantung pada political will dan kepemimpinan kepala daerah yang visioner. (Amelia 2024) menegaskan bahwa kepala daerah yang mampu membangun sinergi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dukcapil, Kominfo, hingga pihak non-pemerintah, lebih sukses dalam melembagakan sistem digital agar tidak hanya menjadi proyek sementara. Selain kepemimpinan, regulasi yang adaptif serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi disparitas literasi digital antarwilayah. Keberhasilan modernisasi tata kelola sosial bukan sekedar soal adopsi teknologi, melainkan kolaborasi berkelanjutan yang berorientasi pada inklusivitas dan transparansi layanan publik bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam praktiknya, implementasi program bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan utama dalam implementasi bantuan sosial terletak pada ketidaktepatan sasaran penerima, yang disebabkan oleh data yang tidak akurat atau tidak terbaru. Selain itu, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah serta kendala teknis dalam penyaluran bantuan juga menjadi hambatan yang sering terjadi. Kondisi ini mengakibatkan bantuan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, juga dapat menghambat pelaksanaan program. Selain itu, sikap pelaksana dan kompleksitas birokrasi turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, program bantuan sosial tetap memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan. Program bantuan sosial terbukti mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam jangka pendek. Selain itu, program seperti PKH dan KIP juga berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas program ini masih belum optimal karena berbagai kendala dalam implementasi, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum maksimal.

Di era globalisasi, pengentasan kemiskinan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan persaingan global menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih tinggi. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan teknologi. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat tertentu semakin tertinggal dan sulit bersaing dalam pasar global, sehingga kesenjangan sosial semakin meningkat.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki akurasi data penerima bantuan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memanfaatkan teknologi dalam penyaluran bantuan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong program pemberdayaan ekonomi, seperti dukungan terhadap usaha mikro, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa penerapan dari kebijakan publik dalam menanggapi kemiskinan di era globalisasi melalui beberapa program bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Langsung (BLT), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah banyak memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar pada masyarakat miskin, membantu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta mampu memutus siklus kemiskinan antar generasi. Meskipun demikian, bergunanya program-program bantuan tersebut masih memiliki hambatan yang disebabkan oleh faktor struktural seperti:

- a. Ketidakakuratan data penerima manfaat.
- b. Masih lemahnya koordinasi antarinstansi oleh pemerintah pusat dan daerah.
- c. Alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang masih kurang berdampak pada angka penurunan kemiskinan.

Masalah ini dapat diatasi secara efektif melalui transisi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan oleh peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025, yang mengintegrasikan Regsosek, DTKS, dan P3KE telah menjadi langkah yang krusial dalam meningkatkan akurasi data dan verifikasi berjenjang via aplikasi SIKS-NG sehingga mampu meminimalisir kebocoran anggaran dan memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Pada era globalisasi saat ini, kemiskinan multidimensional yang cakupannya pada aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup karena modifikasi struktural dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat terlihat pada pergeseran dari sektor pertanian ke jasa, dominasi dari perusahaan multinasional, pasar tenaga kerja yang fleksibel dan digitalisasi yang meningkatkan kesenjangan akses teknologi di antara kelompok sosial. Globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi cenderung lebih menguntungkan pada mereka yang berpendidikan tinggi dan memiliki aset keuangan dan mengabaikan kaum miskin yang lebih rentan termasuk pekerja informal dan penduduk pedesaan sehingga kebijakan sosial perlu adaptif dan inklusif seperti yang diwakili oleh negara kesejahteraan yang beradaptasi dengan keterbatasan anggaran dan aliran modal internasional. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) mengonfirmasi bahwa terdapat enam variabel kunci yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi-sosial-politik secara signifikan memengaruhi keberhasilan program bansos, di mana kelemahan pada komunikasi dan lingkungan sering kali menyebabkan implementasi yang tidak optimal.

Secara keseluruhan, dapat dinyatakan bahwa meskipun program bantuan sosial memang berhasil dalam jangka pendek untuk mempertahankan daya beli dan tingkat konsumsi keluarga miskin, keberhasilan jangka panjang juga membutuhkan strategi untuk peningkatan status penerima manfaat dengan menggunakan peringkat objektif status kesejahteraan di antara penerima manfaat di DTSEN, yang memungkinkan keluarga mampu untuk memberikan kesempatan bagi yang lebih membutuhkan. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya di mana keberhasilan PKH dan BPNT dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perilaku baik telah ditunjukkan (seperti pemeriksaan kesehatan rutin). Meskipun demikian, ketergantungan bantuan dan distribusi geografis yang tidak merata tetap menjadi masalah yang menggarisbawahi pentingnya mengadopsi pendekatan spesifik konteks dengan mempertimbangkan fitur unik kota dan daerah pedesaan. Memang, upaya penurunan kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan beberapa keberhasilan. Tetapi,

membutuhkan perbaikan lebih lanjut untuk mengatasi dampak globalisasi dalam mencapai tujuan RPJMN yaitu angka kemiskinan satu digit.

## **2. Rekomendasi kebijakan**

Untuk meningkatkan proses implementasi pada kebijakan penurunan angka kemiskinan di Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu meningkatkan akurasi dan keandalan pada sistem pengumpulan data. Secara khusus, pemerintah harus menyinkronkan data DTSEN dan SIKS-NG dengan data Dukcapil melalui satu NIK. Selain itu, pemerintah harus melakukan verifikasi lapangan minimal triwulanan untuk mengurangi margin kesalahan data yang dikumpulkan di bawah 10% dan menerapkan graduasi ilmiah sistematis bagi anggota KPM. Langkah lain adalah meningkatkan koordinasi antar sektor, yaitu membentuk Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan (SATG) di tingkat kabupaten atau kota, termasuk Dinas Sosial, Dukcapil, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bappenas, serta mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali untuk menyelesaikan masalah ego sektoral.

Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh proses globalisasi di Indonesia, pemerintah perlu menerapkan program pemberdayaan ekonomi untuk memberdayakan pekerja informal (dengan melatih mereka untuk bekerja dengan teknologi digital), memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin untuk memulai usaha kecil dengan bantuan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah hendaknya melakukan penilaian terhadap pengeluaran untuk program perlindungan sosial, menggunakan kriteria efisiensi dan pemerataan (efisiensi-ekuitas), termasuk menetapkan target pengurangan anggaran bansos hingga 20% yang kemudian akan disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi setelah proses kelulusan KPM. Terakhir, melakukan evaluasi kebijakan tahunan menggunakan metode campuran yang menggabungkan model implementasi Van Meter dan Van Horn beserta Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) yang dikembangkan oleh UNDP dan Oxford, untuk menciptakan siklus perbaikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Risma (2025). 2023. "Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Program PKH dan BPNT di Provinsi Sulawesi Barat = Evaluation of Social Assistance Policy of PKH and BPNT Programs in West Sulawesi Province."
- Amelia, Nadya; Fitrianto. 2024. "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Transparansi Penyaluran Dana Sosial dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia." BIYAN: Jurnal Ilmiah Bidang Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial.
- Emilia, Herlin Putri, Timbul Dompok, Program Studi, Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, dan Bank Indonesia. 2024. "ANALISIS DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP." 2:824–35.
- Inof, Margareth. 2024. Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model).
- Mansur, Yuwarman. 2024. "Analisis Perkembangan Penduduk Miskin , Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia." 8(1):18–31.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani. 2016. "KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Sholih Muadi Ismail MH Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Sofwani." 06:195–224.
- Prof. Budi Winarno, D. M. A. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Media Pressindo.
- Studi, Program, Administrasi Negara, dan Universitas Wijaya Putra. 2022. "DAMPAK GLOBALISASI DI NEGARA INDONESIA Fadhilah Dwi Widianti." 2:73–95.

- Suardini, Dila Andini, Hanny Purnamasari, Lina Aryani, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, dan Universitas Singaperbangsa Karawang. 2025. "ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENGENTASAN KEMISKINAN ERA PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2024." 7:149–70.
- Widyaningsih, Dyan. 2023. "URGENSI MEMUTAKHIRKAN DATA TERPADU KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKUALITAS : PEMBELAJARAN DARI STUDI KASUS DI ENAM DAERAH DI INDONESIA THE URGENCY OF SUSTAINABLE AND HIGH-QUALITY UPDATE OF INTEGRATED POVERTY DATA : LESSONS LEARNED FROM CASE STUDIES IN SIX INDONESIAN." 31(2):2–8. doi:10.55981/jep.
- Zein, Athaya Zulfa; Yasien. 2026. "TRANSFORMASI SISTEM PENDATAAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA." Universitas Lampung.